

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah dapat ikut campur secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah mengupayakan agar kebijakan maupun peraturan yang berlaku dapat memberikan kenyamanan kepada setiap individu untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan iklim perekonomian yang semakin baik. Untuk menilai kebijakan pemerintah, haruslah didasarkan pada pengaruh dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap alokasi sumber daya yang dihasilkan oleh perekonomian (Rahardjo, 2011:13).

Alokasi sumber daya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk membiayai pelayanan umum dan pembangunan secara berkelanjutan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diharapkan akan dapat mencapai kehidupan yang makmur. Pembiayaan memerlukan dana atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Anggaran pemerintah daerah dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Dalam penyusunan APBD, anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, agar pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemerintah. Sistem pengelolaan anggaran disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Baik atau tidaknya hasil yang dicapai oleh pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran, dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun diwujudkan dalam anggaran (APBN/APBD). Bagi pemerintah anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintah dan pertanggungjawaban (Muindro, 2010: 8).

APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang telah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, setiap pimpinan dari masing-masing kementerian/lembaga (pada pemerintah pusat) dan pimpinan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (pada pemerintah daerah) untuk melaksanakan pengelolaan dibidang keuangan diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (I Gusti, 2010:16).

Sebagaimana kegiatan pengelolaan keuangan Negara/Daerah, sistem pengelolaan keuangan Negara/Daerah harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD. Berdasarkan persetujuan DPRD kota Batam dan Walikota Batam menetapkan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 yang dimaksudkan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan anggaran dalam UU Keuangan Negara ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, keuangan Negara disebutkan bahwa belanja Negara/Daerah dirinci samapai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

dan jenis belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Salah satu jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah anggaran belanja modal, yang dijabarkan dalam rasio belanja modal yang merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor-sektor ekonomi (Mafizatun dalam jurnal). Investasi sangat bermanfaat untuk jangka menengah serta jangka panjang. Salah satu cara memanfaatkan *Surplus* anggaran dengan melakukan investasi sehingga dapat membantu peningkatan kebutuhan pemerintah untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang belum dicapai, sehingga tata kelola birokrasi yang diinginkan bersama baik pemerintah maupun masyarakat dapat tercapai. Hal ini menunjukkan investasi pemerintah daerah memberikan pengaruh atau dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan oleh Mafizaton Nurhayati (2015).

Tata kelola yang baik (*good governance*) menurut World Bank mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Upaya untuk menciptakan penyelenggaraan *good governance* pemerintahan Kota Batam melaksanakan birokrasi satu pintu terpadu dalam upaya memperbaiki sistem kinerja.

Menurut Moeheriono (2010:61) pengertian atau definisi kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sehingga implementasi birokrasi *good governance* memberikan hasil kerja yang nyata pada aspek politik, ekonomi, dan administratif.

Menurut United Nation Development Program (UNDP), *political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*), *economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan *administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis kinerja keuangan dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Menganalisa Kinerja Keuangan dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi disetiap daerah di Indonesia ini, secara khusus pada Pemerintahan Kota Batam, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.
2. Bagaimana pengaruh rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.
3. Bagaimana pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada Analisis Kinerja keuangan dilihat dari aspek Rasio efisiensi keuangan daerah, Rasio belanja modal dan Investasi pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota Batam periode Tahun 2010 sampai 2015.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah dilihat dari aspek rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah dilihat dari aspek rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?
3. Bagaimanakah investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah dilihat dari aspek rasio efisiensi keuangan daerah, rasio belanja modal dan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah di lihat dari aspek rasio efisiensi keuangan daerah, rasio belanja modal dan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal dan Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam, adalah sebagai berikut:

### **1. Aspek teoritis**

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal dan Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

### **2. Aspek praktis**

- a. Bagi peneliti, sebagai bahan belajar dalam pemecahan masalah tentang Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal dan Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta sumbangan dalam mengelola serta meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah, Investasi Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi daerah Kota Batam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan referensi serta bahan dalam menindak lanjuti penelitian yang sama serta memperbaiki kekurangan penelitian yang ada sekarang.